KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Dorong Danais Disalurkan Ke Desa
Tanggal : Selasa, 09 Juli 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tim Pemantau Dana Otonomi Khusus DPR mendesak Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyalurkan dana keistimewaan (Danais) hingga ke desa.

Atasi Ketimpangan Ekonomi Daerah Istimewa

DPR Dorong Danais Disalurkan Ke Desa

PARA wakil rakyat meyakini, penyaluran danais hingga ke tingkat terendah dapat memperkecil kesenjangan di tengah masyarakat, terlebih provinsi tersebut memegang rekor tingkat ketimpangan (rasio gini) tertinggi secara nasional.

Anggota Tim Pemantau Dana Otonomi Khusus DPR My Esti Wijayanti menilai, penggunaan danais di Provinsi DIY tak berlangsung secara terbuka dan transparan. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY tak melibatkan masyarakat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan rencana dan penggunaan Danais.

"Ini (tidak adanya pelibatan masyarakat dan DPRD) mengisyaratkan tidak adanya transparansi penggunaan Danais. Dulu, sempat ada pasal yang mengatur itu. Namun, sepertinya pasal itu dihilangkan," tegas Esti dalam audiensi dengan Pemprov DIY di Kompleks Pemda DIY, Kepatihan, Yogyakarta, kemarin.

Ke depan, politisi PDIP itu mendesak, Danais Provinsi DIY dapat disalurkan hingga ke desa. Menurutnya, penyaluran danais hingga ke tingkat desa dapat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, sekaligus mengurangi rasio gini di Provinsi DIY.

"Saat ini, rasio gini DIY mencapai 0,422. Angka ini lebih tinggi dibanding angka nasional yang hanya sebesar 0,384," sesal anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Yogyakarta itu.

Selain itu, lanjut Esty, keterlibatan masyarakat dan anggota DPRD dalam penyusunan rencana dan penggunaan Danais juga berperan besar dalam menyelaraskan berbagai program. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih alokasi antara pembiayaan danais dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua Tim Pemantau Dana Otonomi Khusus DPR Fadli Zon melontarkan pernyataan senada. Menurutnya, Danais di DIY berbeda dengan dana otonomi khusus di dua daerah lain, yakni Aceh dan Papua, yang mempunyai skema pembagian 80 persen dikelola provinsi, sisanya daerah.

"Di sini (DIY), Danais dikelola seluruhnya oleh Pemda DIY. Sejak dikucurkan pada Tahun 2012, jumlahnya terus meningkat dari Rp 500 miliar. Tahun ini, DIY menerima Rp 1,2 triliun dengan tingkat penggunaan hingga 96 persen," ungkap Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan ini.

Selain mendesak alokasi anggaran hingga ke tingkat desa, Fadli meminta, danais Provinsi DIY diprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi kreatif dan kerakyatan. Dengan begitu, kehadiran dana tersebut dapat membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat Yogyakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DIY Gatot Saptadi mengakui, penyusunan dan penggunaan Danais tidak melibatkan DPRD dan masyarakat. Menurutnya, Danais disalurkan bersamaan dengan APBD DIY. ■ ONI